

Politisi Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

JAKARTA (IM) - Deputi Badan Penanganan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto gagal move on untuk menerima kenyataan bahwa pasangan calon (paslon) yang diusung partainya kalah telak saat Pilpres 2009.

Sehingga, menurut Kamhar, Hasto kemudian mengungkit persoalan Pemilu 2009 dengan menyebut adanya berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu.

"Hasto kembali mengalihkan topik dari polemik tentang pengambilan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden pendahulunya ke persoalan Pemilu 2009," kata Kamhar dalam keterangannya, Minggu (24/10).

Kamhar menanggapi tuduhan Hasto yang menyebut adanya pendekatan kekuasaan dalam Pemilu 2009. Pemilu 2009 berlangsung di tengah masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Publik masih ingat, kontestasi Pilpres 2009 diikuti 2 incumbent. Selain Pak SBY, juga ada Pak Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Pak Wiranto. Jadi tak mungkin menggunakan pendekatan kekuasaan," katanya.

Selain itu, klaim Kamhar, hasil-hasil survei dari seluruh lembaga survei juga tak jauh berbeda dengan hasil Pemilu 2009 yang memenangkan paslon SBY-Boediono. Atas hal tersebut, Kamhar meminta Hasto tidak membuat argumen yang sembarangan dan terkesan intelektual, tetapi tidak punya justifikasi.

Menurutnya, Hasto juga tidak memiliki integritas membicarakan tentang netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat itu.

"Justru dialah yang memiliki rekam jejak hitam mengintervensi KPU untuk memuluskan buronan Harun Masiku yang kini entah di mana. Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harun Masiku," jelasnya. ● han

Airlangga Klaim Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim, partai berlambang pohon beringin yang saat ini dipimpinnya merupakan partai tertua yang paling demokratis di Indonesia. Pada Oktober 2021 ini, Golkar menginjak usia ke-57 tahun.

"Kami bisa mengatakan ini partai paling tua di Indonesia dan partai paling demokratis di Indonesia," kata Airlangga dalam sambutannya saat meresmikan Masjid Ainul Hikmah di Kantor DPP Golkar yang diarsik secara daring, Minggu (24/10).

Airlangga berharap, peringatan HUT Partai Golkar yang pada tahun ini berdekatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, memberikan keberkahan bagi partai dan seluruh kader. Dia mengatakan, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang seluruh hidupnya menjadi teladan bagi umat manusia.

"Semakin berkah HUT Partai Golkar karena berdekatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami berharap dengan ber-

salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaatnya hingga hidup kita penuh keberkahan," ujarnya.

Ia mengatakan, Masjid Ainul Hikmah yang didirikan dan diresmikan Partai Golkar sekaligus bentuk pengingat bagi seluruh kader, bahwa perjuangan tanpa ibadah kepada Allah SWT tidak akan menjadi berkah.

Selain itu, kata Airlangga, filosofi dari nama Masjid Ainul Hikmah, yaitu agar tiap kader Partai Golkar, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif dapat membuat kebijakan yang bijaksana. Airlangga mengklaim, Golkar merupakan satu-satunya partai yang memiliki masjid besar di kantor DPP.

"Masjid ini diberi nama Ainul Hikmah yang berarti mata kebijaksanaan. Filosofinya adalah setiap kader yang diputuskan atau kebijakan yang diputuskan kader Golkar baik di eksekutif maupun legislatif harus bijaksana. Binasanya kalau orang bijaksana sudah memiliki kematangan, kedewasaan, dan kearifan," tuturnya. ● mei



IDN/ANTARA

OPEN SHIP KRI BIMA SUCI DI CILACAP

Prajurit KRI Bima Suci membantu warga usai berkunjung ke KRI Bima Suci saat 'open ship' di Pelabuhan Pelindo III Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (23/10). Kegiatan open ship tersebut untuk memperkenalkan KRI Bima Suci kepada masyarakat Cilacap dan sekitarnya, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

Kodam Jaya Ungkap Rachel Vennya Sempat Karantina 3 Hari di RSDC

JAKARTA (IM) - Selegram Rachel Vennya mengaku tak pernah melakukan karantina setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Namun, Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS mengatakan, Rachel Vennya tercatat pernah masuk di Wisma Atlet Pademangan selama tiga hari.

"Kalau hasil dari pengecekan di absensinya kan sempat masuk. Kalau di absensinya saya lihat itu sempat masuk 3 hari," kata Herwin saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (24/10).

Herwin tidak bicara lebih banyak terkait kapan tepatnya Rachel Vennya masuk ke Wisma Atlet Pademangan. Namun, dia memastikan nama Rachel Vennya tercatat sebagai salah satu orang yang pernah melakukan karantina di Wisma Atlet Pademangan. Rachel Vennya saat ini memang menjadi sorotan publik setelah melakukan aksi kabur saat karantina di RSDC Pademangan. Rachel Vennya kabur karantina sepulang dari Amerika Serikat.

Sebelumnya, Rachel Vennya sempat buka suara perihal kasus yang kini menyorotnya. Namun Rachel Vennya justru

membantah pernah melakukan karantina di RSDC Pademangan.

"Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet," kata Rachel Vennya dalam channel YouTube Boy William, Senin (18/10).

"Aku tidak menginjak sama sekali di Wisma Atlet," lanjutnya.

Namun beredar foto di media sosial diduga Rachel Vennya dan kekasihnya di Wisma Atlet. Wajah dua orang di foto itu ditutup emoticon tapi netizen menduga keduanya adalah Rachel Vennya dan kekasih.

Berdasarkan keterangan Kodam Jaya sebelumnya, RSDC Wisma Atlet Pademangan sebenarnya hanya diperuntukkan bagi kategori tertentu, yaitu:

- 1) Para pekerja migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia
- 2) Pelajar/mahasiswa Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar dari luar negeri
- 3) Pegawai pemerintah RI yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas dari luar negeri.

● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



KUNJUNGAN MENSOS DI BLITAR Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Kiri) menabur bunga di Pusara Makam Presiden Soekarno saat melakukan kunjungan kerja di Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (23/10). Selain berziarah, Mensos juga meninjau langsung proses pembersihan dan perawatan pada sejumlah fasilitas yang berada di kawasan makam presiden Soekarno.

Soal Jadwal Pemilu, Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU

KPU memiliki tiga dasar hukum yang kuat dalam menentukan jadwal pemungutan suara untuk Pemilu. Sebab itu, pemerintah dan DPR tidak terlalu mengintervensi KPU.

JAKARTA (IM) - Ketua Lembaga Riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Viola Reininda meminta agar Pemerintah dan DPR tidak terlalu banyak mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jadwal pemungutan suara Pemilihan Umum

(Pemilu) 2024.

Adanya intervensi pemerintah dan DPR, diduga membuat jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 tak kunjung diputuskan KPU hingga kini.

"Pemerintah dan DPR di sini cukup sebagai pihak yang kemudian seharusnya tidak

terlalu banyak mengintervensi KPU dalam memberikan keputusan," kata Viola dalam diskusi publik secara virtual, Minggu (24/10).

Viola mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR yang terkesan ngotot terkait jadwal pemungutan suara.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan agar jadwal pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada 15 Mei, sedangkan KPU pada jadwal semula yaitu 21 Februari 2024. "Dominasi dari pemerintah dan DPR itu kemudian membuat kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kepentingan di balik

keukeuhnya menetapkan jadwal pemilu ini seperti itu. Apa yang mau dicapai?," kata Viola dengan nada bertanya.

Ia memahami bahwa sejumlah usulan telah diberikan oleh pemerintah dan DPR terkait jadwal pemungutan suara. Semestinya, lanjut dia, saat ini pemerintah dan DPR memberikan kesempatan kepada KPU untuk segera memutuskan jadwal pemungutan suara. "Mestinya kan penetapan jadwal itu di tanggal 6 Oktober 2021, tetapi kemudian karena dianggap masih deadlock, masih belum ada kesepakatan. Sehingga penetapan jadwal itu diundur lagi," ujarnya.

KPU Punya Dasar Hukum

Sementara itu Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia Salabi menilai bahwa KPU memiliki dasar hukum yang kuat dan berwenang untuk menentukan jadwal pemungutan suara untuk Pemilu.

Setidaknya ada tiga dasar kerangka hukum kemandirian KPU untuk menentukan atau membuat peraturan KPU (PKPU), termasuk jadwal pencoblosan Pemilu.

"Ada tiga dasar hukum yang menegaskan bahwa KPU berwenang untuk menetapkan hari, tanggal dan waktu pe-

munngutan suara Pemilu," kata Amalia.

Pertama, kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Adapun pasal itu berbunyi; "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri".

"Di Konstitusi, KPU dijamin untuk bisa bersikap mandiri," ucapnya.

Kemandirian KPU untuk menyelenggarakan Pemilu dianggap dipertegas melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 167 ayat (2) UU Pemilu disebutkan bahwa; "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU".

Kemudian, ayat (6) berbunyi; "Tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara".

"Pasal 167 UU Nomor 7 Tahun 2017 itu juga secara terang benderang dinyatakan oleh para pembuat UU bahwa penentuan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilu itu ditentukan oleh KPU dan dengan keputusan KPU," jelasnya. ● han

Puluhan Kapal Perang TNI AL Siaga Tempur di Kepulauan Riau, Ada Apa?

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, melepas unsur-unsur kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang tergabung dalam Latihan Operasi Amfibi (Latopsfib) TNI AL yang memasuki tahap Gerakan Menuju Sasaran satu (GMS I).

Dalam rangka menuju daerah pendaratan harus melewati rintangan dari serangan musuh di tengah laut berupa serangan dari bawah air, permukaan dan udara. Demikian salah satu skenario Latopsfib TNI AL di Dabo Singkep, Kepulauan Riau.

Manuver dalam GMS I ini sejumlah KRI melaksanakan kegiatan antara lain, anti sub-marine warfare exercise, air defense exercise dengan sasaran simulasi formasi pesud TNI AL Bonanza, anti air rapid open fire exercise dengan simulasi serangan udara musuh, dan anti surface warfare exercise.

Kegiatan serial latihan ini disaksikan langsung Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Para Pejabat Utama Mabesal dan Para Pangkotama TNI AL serta rencananya para anggota DPR RI dari Komisi I akan on board di Kapal Markas KRI Makassar-590.

Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, mengatakan,

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT. LINTAS LIMA LESTARI LAKSANA, berkedudukan di Jakarta Barat, ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 15 Oktober 2021 nomor 72 yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG. SH., SE., MH., Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21 Oktober 2021 nomor AHU-0058342.AH.01.02.Tahun 2021 dan pembentukannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 21 Oktober 2021 nomor AHU-AH.01.03-0463259, POLYCHEM CAPITAL LIMITED telah melakukan pengambilalihan sebagian besar saham dalam Perseroan dari para pemegang saham Perseroan terdahulu.

Jakarta, 25 Oktober 2021

Direksi

PT LINTAS LIMA LESTARI LAKSANA



IDN/ANTARA

SYARAT PENERBANGAN TERBARU PADA MASA PPKM JAWA BALI

Calon penumpang pesawat antre di area lapor diri sebelum melakukan penerbangan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (23/10). Kementerian Perhubungan mengelarakan aturan terbaru terkait syarat penerbangan udara pada masa PPKM yakni penerbangan dari atau ke bandara di pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan surat keterangan negatif RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2X24 jam sebelum keberangkatan.